

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran (*role*) adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang. Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat¹. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu bahkan dapat meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan di atur oleh norma yang berlaku.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk memengaruhi orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang

¹ Abdullah, Mulat Wiganti. *Sosiologi untuk SMP dan MTS VII*, Grasindo, 2011, hlm. 53

dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.²

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka salah satu tugas seorang kepala desa adalah melaksanakan pembangunan.

Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai usaha mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk kegiatan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan disadari pada umumnya berawal dari masyarakat dan akibatnya memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri.

Masyarakat tidak bertindak sendiri dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi masyarakat diatur dan kendalikan oleh pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tumpang tindih dalam pembangunan. Pemerintah desa

². Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 217

sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan menciptakan kehidupan yang harmonis di desa.

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa (kepala desa) perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan. Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya dan berkembang atau tidak suatu pembangunan desa.

Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana pasal 1 ayat 9 tahun 2013 Undang-undang tentang desa menyebutkan bahwa kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan suasana fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Masyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa seharusnya dilibatkan dalam proses pembangunan di desa. Keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan. Tanpa

adanya keterlibatan masyarakat maka belum tentu pembangunan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan desa. Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerinatah desa atau kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar, kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu pembangunan desa itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang muncul dari kesadaran masyarakat untuk ikut turut serta melaksanakan berbagai kegiatan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun membantu dalam hal yang lain, seperti memberikan uang (bagi mereka yang merasa mampu), bahan-bahan yang diperlukan ataupun barang material lainnya. Namun ada sebagian anggota masyarakat dapat membantu dalam hal memberikan sumbangan pandangan, pikiran dan tenaga.

Kesediaan masyarakat dapat membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri

sendiri. Tentu saja partisipasi seperti ini suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Desa Gunungguruh merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gunungguruh. Desa Gunungguruh yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 3491.100 km² yang terdiri dari 4 dusun dan rukun tetangga 63 (RT). Desa Gunungguruh terdiri dari 3.243 Kepala Keluarga dan total penduduk 10.015 jiwa (Profil Desa Gunung Guruh, 2017). Saat ini Desa Gunungguruh dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ibu Tati Kusniawati, yang memimpin mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019.

Berdasarkan hasil observasi penulis dan informasi dari masyarakat desa yang dilakukan pada 23 November 2017 di Desa Gunungguruh, warga mengemukakan bahwa pada kepemimpinan pemerintah desa saat ini mengalami kemajuan dan perubahan kearah yang lebih baik terutama dalam pembangunan desa. Pembangunan desa yang berorientasi pada bidang infrastruktur , bidang

olahraga, bidang keagamaan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang insfrastruktur diantaranya; pembangunan jembatan selakosa yang proses pembuatannya meniru dari negara Belanda yaitu dari kayu yang diawetkan, jembatan besi yang menghubungkan dari desa ke kota madya, pembuatan mushola dan MCK yang bahan-bahannya dihasilkan dari keterampilan masyarakat setempat seperti genteng, batu bata, dan pasir, serta pembangunan wisata alam yang merupakan hasil inisiatif masyarakat setempat kemudian dikembangkan oleh pemerintah desa seperti Bukit Karang Numpang yang telah diresmikan oleh wali kota Sukabumi. Sedangkan pada bidang olahraga pemerintah desa memberdayakan generasi muda dengan membangun lapang bulu tangkis disetiap dusun, lapangan volley, tenis meja dan lapang sepak bola dengan tujuan agar generasi muda di Desa Gunungguruh dapat mengembangkan bakatnya, dan menggunakan waktu dengan hal-hal positif. Selain memberdayakan generasi muda di bidang olahraga , pemerintah setempat juga memberdayakan generasi muda Desa Gunungguruh pada bidang keagamaan pemerintah desa membentuk remaja masjid yang berjumlah 230 orang yang mana remaja masjid tersebut memiliki beberapa kegiatan yang akan menggiring masyarakat pada kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian, bidang pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan kapasitas kelompok tani dan kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif pengelolaan sampah menjadi biogas.

Beberapa pembangunan desa diatas dapat terwujud karena melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dimulai dari tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pemantauan dan

evaluasi pembangunan, dan tahap pemanfaatan hasil pembangunan. Sehingga pembangunan desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Gunungguruh .

Meningkatnya tingkat partisipasi warga Desa Gunungguruh tersebut tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala desa itu sendiri. Menurut Rivai (2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan para pekerjaan para anggota kelompok. Gaya kepemimpinan pemerintah desa Gunungguruh mengarah pada gaya kepemimpinan kharismatik dimana seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan. Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokrasi. (Yuki, 1998:102).

Dari hasil observasi pra riset yang penulis lakukan dan informasi dari warga masyarakat Kepala Desa Gunungguruh saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Selain dari segi pembangunan desa, kepala desa Gunungguruh juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: kepemimpinan kepala desa, pendidikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneulisan dengan judul **“PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA”** (Studi Kasus di Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa masalah yang terkait peran kepemimpinan kepala desa di Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.

Adapun masalah yang ditemukan oleh penulis dalam melakukan observasi di daerah tersebut yaitu :

1. Respon masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa Ibu Tati Kusniawati sangat baik, karena beliau dengan perangkat desa lainnya mampu menggiring masyarakat untuk ikut peduli dengan cara berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan yang akan atau sedang berlangsung di Desa Gunungguruh.

2. Bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu dengan melewati beberapa tahap, diantaranya; pertama, pengambilan keputusan; kedua, pelaksanaan pembangunan, ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan; dan keempat pemanfaatan hasil pembangunan.
3. Pembangunan desa yang berorientasi pada bidang pembangunan infrastruktur, bidang olahraga, bidang keagamaan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian merumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi kepemimpinan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh?
2. Apa saja faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
3. Bidang pembangunan apa saja yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gunungguruh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi kepemimpinan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3. Untuk mengetahui apa saja bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh.
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat dan para pemilik saham industri. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah diharapkan penelitian itu dapat menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran atau wawasan keilmuan yang dikhususkan dalam bidang kajian ilmu sosiologi khususnya sosiologi organisasi, sosiologi pembangunan, dan sosiologi desa kota yang dikhususkan dalam peranan

kepemimpinan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi kebijakan yang akan diambil pemerintah Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- b. Kegunaan penelitian ini sebagai tolak ukur bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1.6. Kerangka Pemikiran

Peran (*role*) adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang. Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat³. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu bahkan dapat meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan

³ Abdullah, Loc.Cit

sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan di atur oleh norma yang berlaku.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk memengaruhi orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.⁴

Tipe-tipe kepemimpinan menurut Max Weber dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang berasal dari garis keturunan atau suku. Dia menyimpulkan bahwa staf pemimpin tradisional kekurangan jumlah bawahan. Staf tradisional kekurangan jabatan dengan lingkup kompetensi yang didefinisikan dengan jelas yang tunduk kepada aturan-aturan impresional. Kepemimpinan tradisional juga tidak mempunyai penataan rasional relasi-relasi superioritas dan inferioritas; ia kekurangan hierarki yang jelas. Tidak ada sistem pengangkatan dan promosi reguler yang berlandaskan perjanjian yang bebas. Pelatihan teknis

⁴. Soekanto, Loc.Cit

bukan persyaratan regular untuk memperoleh suatu posisi atau pengangkatan.

2. Kepemimpinan Kharismatik merupakan mempunyai kapasitas untuk mengubah sistem sosial yang ada berdasarkan persepsi pengikut yang pemimpin ditakdirkan mempunyai kemampuan istimewa. Menurut Max Weber kepemimpinan karismatik akan muncul jika terjadi krisis sosial, dengan visi yang radikal yang menyajikan solusi terhadap krisis. Kepemimpinan kharismatik tidak mendasar kepada otoritas formal atau kekuasaan posisional, akan tetapi pada kekuasaan personal. Karena mengubah sistem yang ada sangat sulit dan memerlukan sumber yang sangat besar, pemimpin karismatik menciptakan sistem yang baru
3. Kepemimpinan Rasional Regal merupakan pemimpin yang memperoleh peraturan yang diberlakukan secara hukum dan nasional⁵

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang menyelenggarakan ditunjukkan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Partisipasi berarti peran serta seorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk

⁵ Ritzer, Goerge Douglas J. Goodman, Edit Tri Wibowo Budi Santosa.. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenida Media Group. Jakarta, 2012, hlm. 105

⁶. Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 109

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi. serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan⁷.

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁸

Untuk membantu menjelaskan penelitian, maka penulis memilih salah satu teori Fungsional Struktural yang ada dalam ranah sosiologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori Fungsional Struktural Talcott Parsons. Pemilihan teori ini karena menurut penulis bahwa teori ini dirasa mendekati dengan pokok penelitian yang sedang dibahas.

Fungsional structural Talcot Parsons melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan bagian yang ada. Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relative stabil dan berkesinambungan sehingga menimbulkan ketergantungan. Teori Fungsionalisme structural Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Ketika perubahan terjadi, umumnya perubahan tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan.

⁷. Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 46

⁸. Jamaludin, *Op.Cit.*, hlm 4

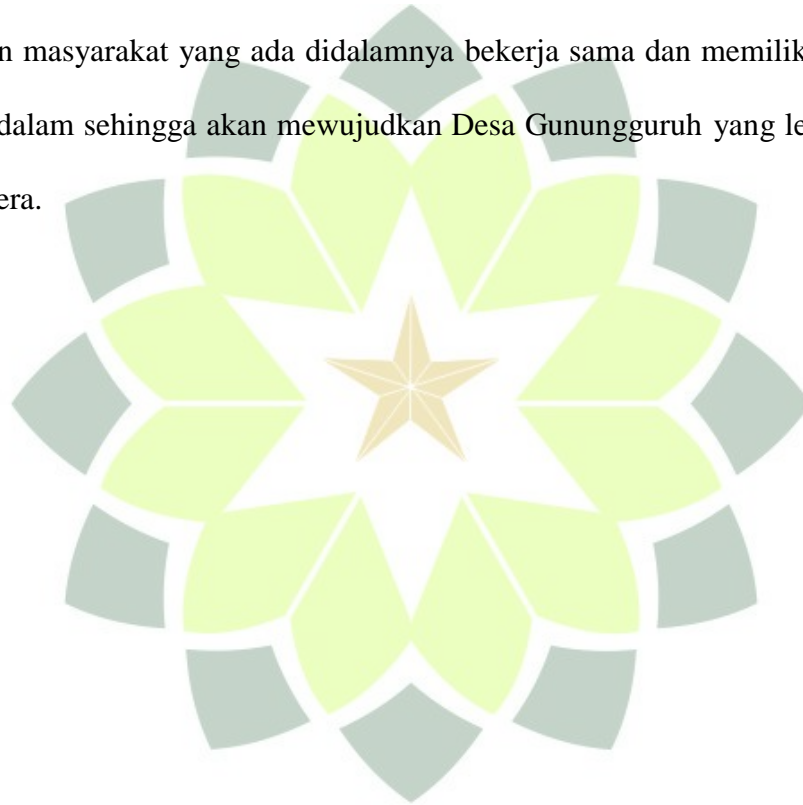
Bahasan tentang fungsionalisme structural Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan, terkenal dengan skema AGIL. Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua *system-adaption* (A), *goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola. Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini :

1. *Adaptation* (Adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L)
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.⁹

Peneliti menggunakan teori Fungsional Struktural dalam menganalisis permasalahan diatas, yang mana dalam suatu sistem sosial atau kesatuan masyarakat adanya suatu hubungan yang satu sama lainnya memiliki keterkaitan dan saling memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, ketika keempat

⁹ Ritzer, Goerge Douglas J. Goodman, Edit Tri Wibowo Budi Santosa.. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenida Media Group. Jakarta, 2012, hlm. 409

subsistem tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya maka akan terjadi suatu keselerasan dan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Sama halnya dengan kepemimpinan pemerintahan Desa Gunungguruh dan semua elemen masyarakat yang ada didalamnya bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama dalam sehingga akan mewujudkan Desa Gunungguruh yang lebih maju dan sejahtera.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

Skema Konseptual Kerangka Pemikiran

